

**PERBANDINGAN SISTEM *CASH BASIS* DENGAN SISTEM
ACCRUAL BASIS ASET TETAP MILIK DAERAH DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

RISKA AYU

105730487014



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

PERBANDINGAN SISTEM *CASH BASIC* DENGAN SISTEM
ACCRUAL BASIC ASET TETAP MILIK DAERAH DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

OLEH

RISKA AYU

105730487014

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda H.Abu dan Ibunda HJ.Jaisa, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a dari kedua orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat–sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah ayat 6-8)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Perbandingan Sistem *Cash Basis* dengan Sistem *Accrual Basis* Aset Tetap Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Riska Ayu
No. Stambuk/ NIM : 105730487014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018

Makassar, 08 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Nurniah, SE., M.SA. AK.CA
NIDN: 00170090604

Pembimbing II


Faidhyul Adziem, SE., M.Si
NIDN: 0921018002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jln. Sultan Alauddin No.259 Ggedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **RISKA AYU**, NIM : **105730487014**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 185 /2018 M, tanggal 26 Muharram 1440 H/ 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE.,M.Si.Ak.CA,Ph.D 
2. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA 
3. Drs. H. Sultan Sarda, MM 
4. Hj. Naidah, SE.,M.Si 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISKA AYU

Stambuk :105730487014

Jurusan :AKUNTANSI

Dengan judul :” Perbandingan Sistem *Cash Basic* dengan Sistem *Accrual Basic*
Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa.”

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 08 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segalarahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Perbandingan Sistem *Cash basic* dengan Sistem *Accrual Basic* Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak h. Abu dan Ibu Hj. Jaisayang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do’a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurniah, SE., M.SA. AK. CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Fidhul Adziem, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar..
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk sahabat penulis, Andriani Amir, Resti Aulia Abbas, Irmayanti, Sunafiana, Ikhwat Nur Syahrim, Hasrianti, Risnayanti dan tina marimasyang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

Riska Ayu, 2018. Perbandingan Sistem *Cash Basic* dengan Sistem *Accrual Basic* Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Nurniah dan Pembimbing II Faidhul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem *cash basic* dengan sistem *accrual basic* aset tetap milik daerah di pemerintah daerah kabupaten gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah Laporan Keuangan mengenai aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 yang didapatkan dari sub bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang membedakan dari kedua sistem pencatatan *cash basic* dan *accrual basic* mengenai aset tetap yang terdapat pada laporan keuangan, dilihat dari penyusutannya dimana pada saat penggunaan sistem pencatatan *cash basis* hanya berbicara aliran kas masuk dan keluar sedangkan jika berbicara mengenai penyusutan tidak menyangkut mengenai aliran kas tetapi mengenai beban sedangkan sistem pencatatan pada saat *accrual basic* dimana pencatatan aset tetap wajib melakukan penyusutan.

Kata kunci : Sistem *Cash Basic*, Sistem *Accrual Basic*

ABSTRACT

Riska Ayu, 2018. *Comparison of cash basic systems with accrual system, basic fixed assets owned by the region in the regional government of Gowa district. Thesis of accounting study program of economics and business faculty of Muhammadiyah University Makassar. Supervised by 1 Nurniah supervisor and 2 Faidhul Adziem advisors.*

This study aims to determine the comparison of the cash basic system with the accrual system, the basic fixed assets owned by the region in the regional government of Gowa district. The type of research used in this study is qualitative descriptive. Processed data are financial statements regarding fixed assets in the regional government of Gowa district in 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 which were obtained from sub sections of assets of the regional government of Gowa district. While the data collection techniques used in this study are filed observations and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that what distinguishes between the two cash basic recording systems with accruals of basic fixed assets contained in the financial statements, seen from depreciation where at the time of use of basic sh shading system only speaks in and out of cash flow while talking about depreciation is not concerning the cash flow but about the burden. While the recording system at the time of basic accrual where the recording of fixed assets is obliged to do depreciation.

Keyword : *cash basic system, accrual basic system.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHASAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKBAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Sistem.....	5
B. <i>Cash Basis</i>	5
C. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Kas Basis.....	6
D. <i>Accrual Basis</i>	7
E. Alasan-alasan Penerapan Basis Akrua.....	8
F. Tantangan Basis Akrua.....	8
G. Keunggulan Akuntansi Accrual Basis.....	10
H. Perbedaan Basis Cash dengan Basis Accrual	10
I. Konsep Aset Tetap	12
J. SAP No.07 Akuntansi Aset Tetap	18
K. Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah.....	19
L. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No. 17 terhadap Aset Tetap	20

M. Tinjauan Empiris	20
N. Kerangka Konsep	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Instrumen Penelitian	28
G. Metode Analisis.....	28
H. Alur Penelitian.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	30
1. Sejarah berdirinya DPKD.....	30
2. Struktur Organisasi	33
3. <i>Job Description</i> Masjid.....	34
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	perbedaan Basis <i>cash</i> dengan Basis <i>Accrual</i>	10
3.1	Skedul Penelitian	27
4.1	Pengakuan, Penilaian, Pengukuran, Aset Tetap PSAP No.07 pada Pemerintah Kabupaten Gowa	39
4.2	Neraca Pemerintah Kab. Gowa 2009.....	41
4.3	Neraca Pemerintah Kab. Gowa 2010.....	42
4.4	Neraca Pemerintah Kab. Gowa 2014.....	45
4.5	Neraca Pemerintah Kab. Gowa 2015.....	45
4.6	Perbandingan Neraca <i>Cash Basis</i> dan <i>Accrual Basis</i>	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Konsep.....	25
3.1	Lokasi Penelitian	26
3.2	Alur Penelitian	29
4.1	Struktur Organisasi	32
4.2	Grafik Neraca <i>Cash Basis</i> dan <i>Accrual Basis</i>	50
4.3	Siklus Aset.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi di Indonesia, khususnya sektor publik telah mengalami banyak perkembangan mulai dari diterapkannya *cash basis* hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Seiring dengan terbitnya Undang-undang Keuangan Negara (UUKN) yaitu UU No. 17 tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, dan UU No.15 tahun 2004 dan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan pokok menurut PP 24 tahun 2005 setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran (selanjutnya disebut LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan. Selain empat laporan keuangan pokok tersebut, terdapat dua laporan lainnya yaitu laporan kinerja keuangan dan laporan ekuitas.

SAP bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta menyatukan persepsi antara penyusunan, pengguna, dan auditor. Penerapan SAP berbasis akrual perlu kerja keras pemerintah daerah karena jumlah laporan yang harus disajikan bertambah banyak. SAP berbasis akrual menyaratkan bahwa laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh laporan dari basis kas menuju akrual yang hanya empat laporan. Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual. Dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diakui adalah pendapatan, beban, aset,

utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*basis cash*). Sistem pencatatan *single entry* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadinya transaksi, transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* sangat sederhana dan mudah dipahami, namun disamping itu juga mempunyai banyak kelemahan.

Banyaknya kekurangan dari *siglestep* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) gowa menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah (LPKD) tahun anggaran 2015. Ini adalah kali kelima Pemkab Gowa menerima penghargaan itu secara berturut-turut. Kabupaten gowa dinilai mampu menerapkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Khusus pada tahun anggaran 2015, tantangan yang di hadapi Pemkab dalam penyajian laporan keuangan yang cukup berat. BPK menentukan penilaian berdasarkan akrual basic, dimana setiap laporan keuangan yang disusun berdasarkan waktu transaksi keuangan. Tingkat kerumitannya lebih tinggi dibanding sistem yang digunakan sebelumnya. Diketahui, penyerahan hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Gowa tahun anggaran 2015 telah berlangsung pada 27 juni lalu di gedung BPK perwakilan sulawesi selatan. Saat itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2015. Secara umum pemberian opini BPK untuk kategori wajar tanpa pengecualian atas LKPD mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan di 25 kab/kota termasuk pemprov sulsel.

Pada akuntansi aset tetap, jurnal untuk perolehan aset tetap dijelaskan dalam pencatatan belanja modal, yang dimana ketika terjadi belanja modal maka secara akrual harus dicatat aset sehingga jurnal-jurnal yang dicatat ketika terjadi belanja modal yaitu aset berada di sisi debet sedangkan piutang berada di sisi kredit. Jurnal untuk perolehan aset tetap yang dijelaskan pada bagian pencatatan belanja modal namun satu hal penting yang membedakan antara metode pencatatan dengan menggunakan *cash basis* dan *accrual basis* adalah pengakuan beban penyusutan. Adapun jurnal untuk pengakuan beban penyusutan pada *accrual basis* yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Sedangkan pada *cash basis* pada saat itu belum diwajibkannya melakukan penyusutan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perbandingan Sistem Cash Basis dengan Sistem Accrual Basis Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dibuat yaitu Bagaimana Perbandingan Sistem Cash Basis dengan Sistem Accrual Basis Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Sistem Cash Basis dengan Sistem Accrual Basis Aset Tetap Milik Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan informasi bagi pemerintah di Kabupaten Gowa mengenai perbandingan antara cash basis dengan accrual basis aset tetap.
2. Dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap akademis, dosen, dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Menurut Diana dan Setiawan, (2011:23) pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem adalah serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Sistem merupakan merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan sebuah organisasi dan sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Jaluanto sunu punjul (2016:1)

B. Cash Basis

Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Halim dan syam (2011:54)

Basis kas menurut KSAP (Kajian Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Suriyanovi (2008) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, transaksi diakui ketika kas diterima atau dibayar tanpa melihat kapan transaksi tersebut timbul atau terjadi. Misalkan: pendapatan diakui ketika uang kas atau setara kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul, sedangkan belanja diakui ketika terjadi pembayaran bukan ketika terjadi kewajiban untuk membayar timbul. Pada basis kas pembelian aset jangka panjang tidak dikapitulasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas

aktiva tetap dan penyusutan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem kas basis biasanya terdiri dari kas dan kekayaan pemilik.

Menurut Beechy (2007) basis kas mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian hanya pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan, sedangkan kewajiban tidak disajikan pada laporan keuangan begitu juga dengan piutang dan aset lainnya. Kahn & Mayes (2009) berpendapat bahwa salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk sukses dalam peralihan ke basis akrual ini adalah sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan. Manfaat basis kas menuju akrual berdasarkan lampiran II PP 71 Tahun 2010 adalah menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan pengalokasian sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undang, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.

C. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Kas Basis (*Cash Basis*)

1. Metode *cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

2. Biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam menghitung pendapatan.
3. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
4. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan
5. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.

D. Accrual Basis

Menurut Simanjuntak, (2010:13) basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi penerapan basis akrual dinilai sangat sesuai karena pencatatan dicatat saat terjadinya arus sumber daya. Basis akrual juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar. Pada basis akrual transaksi diakui pada saat timbul atau terjadi tanpa memperhatikan kapan kas setara kas di terima atau dibayar. Neraca yang dihasilkan dengan menggunakan sistem akrual basis mengakui adanya piutang dan utang, seperti transaksi pembayaran di muka Suriyanovi (2008).

Akuntansi basis akrual seperti telah disimpulkan oleh KSAP dari berbagai sumber adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan

peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal dalam Akuntansi Pemerintah Indonesia, 2006).

E. Alasan-alasan Penerapan Basis Akruwal

Basis akruwal secara nyata memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Maka dari itu Widjajoso (2009) memaparkan alasan penerapan basis akruwal pada sektor pemerintahan, antarlain:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akruwal sangat disarankan.
2. Hanya akuntansi berbasis akruwal menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Hanya akuntansi berbasis akruwal yang dapat dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
4. Hanya akuntansi berbasis akruwal yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

F. Tantangan Basis Akruwal

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak Menurut Blondal

(2003), terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu:

1. Persiapan dalam perubahan budaya entitas pemerintah. Basis akrual tidak hanya sekedar pelatihan teknik akuntansi. Basis ini melibatkan perubahan budaya dalam entitas pemerintah. Basis akrual dikatakan berhasil apabila laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Memang perubahan ini tidak terjadi secara otomatis, jadi diperlukan sosialisas secara aktif khususnya pada pegawai senior dan pegawa yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.
2. Pemilihan model implementasi. Terdapat dua model dalam upaya implementasi basis akrual yang dijadikan pertimbangan, yaitu Model Big Beng dan model bertahap. Pada pendekatan model big beng, basis akrual secara langsung diterapkan pada entitas pemerintah, pengambilan keputusan harus segera dibuat seiring dengan kemunculan berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari penggunaan sistem akuntansi yang baru namun, dengan berjalannya waktu sistem akuntansi akrual nantinya akan dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut.
3. Membutuhkan komunikasi, negara yang pertama kali mengimplementasikan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya membutuhkan lebih banyak komunikasi mengenai proses pengimplementasikan komunikasi ini mencakup asosiasi adanya perubahan budaya organisasi. Dalam hal ini hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

G. Keunggulan Akuntansi *Accrual Basis*

1. Metode ini bisa digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Informasi bisa lebih handal dan terpercaya karena beban dan pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi.
3. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan diperhitungkan dalam cadangan kerugian piutang.
4. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat ke dalam masing-masing akun sesuai transaksi yang terjadi.
5. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan sehubungan dengan adanya pendapatan yang masih harus diterima.

H. Perbedaan Basis Cash dengan Basis Accrual

Perbedaan basis cash dengan basis accrual dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Basis cash dengan Basis Accrual

	<i>Cash basis</i>	<i>Accrual basis</i>
Komponen laporan keuangan	1. Laporan realisasi anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan atas laporan keuangan (CALK)	1. Laporan realisasi anggaran (LRA) 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 3. Neraca 4. Laporan opsional (LO) 5. Laporan arus kas (LAK) 6. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)
Pengakuan pendapatan	Pengakuan pendapatan pada basis kas adalah pada saat penerimaan pembayaran secara kas. Dalam konsep saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat mempunyai hak	Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan. Dalam konsep basis akrual menjadi hal yang kurang penting mengenai

	untuk melakukan penagihan dari cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertaih (Ritonga, 2004:3).	kapan kas benar-benar diterima. Maka dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima (Ritonga, 2004:3).
Pengakuan biaya	Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat pembayaran sudah diserahkan maka biaya sudah diakui pada saat itu juga (Ritonga, 2004:3)	Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai awal munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep basis akrual (Ritonga, 2004:3).

Sumber: Risnaningsih (2016)

Menurut Syadza (2013) beberapa perbedaan *cash basis* dengan *accrual basis* sesuai dengan PP 71 tahun 2010 antara lain dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Penyusutan Aset Tetap

Pada *cash basis* tidak diuraikan dalam kerangka konseptual, sedangkan pada *accrual basis* konsep penyusutan aset disebutkan bahwa aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

2. Entitas Akuntansi

Pada *cash basis* belum ada uraian mengenai entitas akuntansi, sedangkan pada *accrual basis* terdapat uraian mengenai entitas akuntansi disamping entitas pelaporan.

3. Entitas Pelaporan

Pada *Cash basis* dijelaskan bahwa entitas pelaporan terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan *accrual basis* selain entitas pelaporan sebagaimana yang disebutkan pada *cash basis*, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.

I. Konsep Aset Tetap

1. Kasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAK No. 16 Revisi (IAI, 2015: 16) klasifikasi aset tetap menurut kelasnya dimana suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri:

- a. Tanah
- b. Tanah dan bangunan
- c. Mesin
- d. Kapal

- e. Pesawat udara
- f. Kendaraan bermotor
- g. Perabot
- h. Peralatan kantor

2. Pengertian dan Kriteria

Agar dapat menghasilkan produk untuk memenuhi tujuannya, setiap perusahaan harus memiliki aset (*asset*). Tanpa memiliki aset, tidak ada perusahaan yang dapat menghasilkan suatu produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Aset yang dimiliki perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria yang dimiliki, mulai dari aset lancar, aset tidak berwujud, hingga aset tetap berwujud.

Setiap perusahaan akan memiliki jenis dan bentuk aset tetap yang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama belum tentu memiliki aset tetap yang sama, apalagi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Umumnya, aset tetap yang sering terlihat dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. Tetapi tidak setiap jenis aset tersebut selalu dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap. Walaupun setiap perusahaan memiliki rincian aset tetap yang berbeda, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aset dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang mana.

Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa tidak setiap aset perusahaan dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

a. Berwujud

Ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti *goodwill*, *hak paten* dan sebagainya.

b. Umurnya lebih dari satu tahun

Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari setahun seperti kertas, tinta printer, pensil, penghapus, selotif, dan sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Dan yang dimaksudkan dengan umur aset tersebut adalah umur ekonomis oleh perusahaan.

c. Digunakan dalam operasi perusahaan

Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Jika suatu aset memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari satu tahun tetapi rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat digunakan untuk operasi perusahaan, maka aset tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap.

d. Tidak diperjual belikan

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan.

e. Material

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari setahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relative tidak terlalu besar dibandingkan total aset perusahaan.

f. Dimiliki perusahaan

Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewakan perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. Kendaraan sewaan, misalnya, walaupun digunakan untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang, tetap tidak boleh diakui sebagai aset tetap.

3. Penilaian dan penyajian

Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan.

Berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari kedua metode yang dapat digunakan, yaitu:

a. Berbasis Harga Perolehan (biaya)

Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada)

b. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)

Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan. Sebagai contoh, sebidang tanah yang dibeli perusahaan 10 tahun yang lalu harganya pasti sudah berlipat-ganda pada saat ini. Jika tanah tersebut disajikan dengan menggunakan biaya historis, maka dianggap tidak mencerminkan lagi kondisi aktual aset tetap perusahaan ketika laporan keuangan disajikan.

Dilihat dari kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang harga pasar (*market value*) suatu aset tertentu, aset dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Aset yang harganya selalu tersedia setiap saat dan mudah diketahui, seperti harga surat berharga di bursa efek. Harga berbagai saham dan obligasi yang terdaftar di bursa efek Jakarta dapat dengan mudah diketahui oleh siapa saja kapan pun diperlukan. Aset dalam

kelompoknya ini mudah sekali menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dan penyajiannya karena ketersediaan data sertacukup objektif nilainya.

- 2) Aset yang harganya tidak selalu tersedia setiap saat dan tidak langsung diketahui dengan mudah, seperti harga properti dan berbagai mesin yang dimiliki perusahaan. Tanah dan bangunan yang dimiliki perusahaan memang selalu memiliki nilai pasar, tetapi harganya akan selalu berbeda antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan aset tersebut. Untuk menilai harga aset tersebut datanya tidak selalu tersedia setiap saat. Memang di Indonesia bias menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang diterbitkan oleh dirjen pajak untuk aset yang berwujud tanah. Untuk aset tetap lainnya seperti bangunan, kendaraan, dan mesin-mesin, mungkin harus menggunakan jasa perusahaan *appraisal/penaksiran* agar dapat dicantumkan secara lebih objektif.
- 3) Aset yang harga pasarnya tidak tersedia dan tidak mudah diketahui. Aset semacam ini biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan karena pesanan khusus akibat keunikan usaha perusahaan tersebut, atau karena hibah yang diberikan pihak lain. Contohnya mencakup aset tetap berupa gedung pembeku daging atau ikan. Gudang pembeku semacam itu biasanya dibangun secara khusus untuk kebutuhan perusahaan pemasok daging atau ikan yang harganya tidak akan tersedia di pasar. Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda tidak akan memerlukan aset tetap semacam ini sulit untuk

menggunakan dasar *market value* dalam penyajian aset tetapnya di laporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan aset tersebut untuk kebutuhan belajar akuntansi pada tingkat dasar, maka metode penilaian dan penyajian aset tetap di buku ini akan menggunakan dasar harga perolehan historis (Rudianto, 2012: 255).

J. SAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
2. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*)

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset

dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (Indra Bastian, 2006:141).

K. Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintahan Daerah

Pemberlakuan akuntansi dengan basis akrual yang mulai diimplementasikan pada seluruh level pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menjadikan pencatatan aset tetap wajib dilakukan. Bukan sekedar pencatatan aset tetap, penyusutan juga wajib dilakukan. Hal ini agak berbeda dengan pendekatan akuntansi sebelumnya yang menerapkan basis kas menuju akrual. Pada basis kas menuju akrual, pencatatan aset tetap wajib dilakukan, namun tidak demikian halnya dengan penyusutan. Penyusutan boleh dilakukan, namun tidak wajib. Perbedaan signifikan dapat kita temui jika kita kembali ke zaman sebelum basis kas menuju akrual digunakan. Pada saat pencatatan yang dilakukan hanya berfokus pada penerimaan dan belanja, atau biasa dikenal dengan akuntansi basis kas, pencatatan aset tetap tidak wajib dilakukan. Jika melihat dari sistem akuntansi yang digunakan, terlihat awal perjalanan akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah bermula dengan sistem akuntansi yang dikenal dengan nama Manual Administrasi Keuangan Daerah (Makuda). Makuda mulai diterapkan tahun 1981. Makuda diterapkan dengan menggunakan basis kas dengan laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan Perhitungan Anggaran dan Nota perhitungan Basri (2004:110).

L. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 terhadap Aset Tetap

Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 (2010: 169) menyatakan bahwa tujuan PSAP 07 adalah "mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap".

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan.

M. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuri Rahayu (2015) dengan judul penelitian "Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis". Tujuan dari penelitian referensi ini ingin memberikan informasi dan pemahaman yang lebih dalam perbedaan dan perlakuan dari kedua metode ini. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa pada dasarnya untuk bisa memahami perbedaan dan sistem *Cash Basis* dan *Accrual basis* mahasiswa diwajibkan sering melakukan stimulasi, baik dalam bentuk workshop atau latihan soal dan baca referensi dari sumber yang kompeten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risnaningsih (2016) dengan judul penelitian "Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI". Tujuan dari penelitian ini adalah standar dan format penyajian laporan keuangan belaka, tetapi juga berdampak pada

berubahnya sistem penyusunan anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Puspita Sari dan Hendrawan Santosa Putra (2012) dengan judul penelitian “Menelisis Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan standar, implementasi basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara, serta kelebihan dan kelemahan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan suatu inovasi dalam unit administrasi publik. Basis akrual diaplikasikan sebagai dasar pencatatan laporan anggaran dan laporan keuangan karena memiliki banyak manfaat. Saat ini, implementasi basis akrual menjadi tren dalam sektor pemerintah di berbagai negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baries Ferryono (2017) dengan judul “Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi basis akuntansi mana (basis akrual atau basis kas menuju akrual) yang memberikan informasi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan internal di pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa basis akrual lebih bermanfaat dari pada basis kas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri (2015) dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada Politeknik Negri”. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana perubahan sistem akuntansi instansi PP 24 tahun 2005 menjadi PP 71 tahun 2010 atau dari *cashtoward accrual* menjadi *accruaI basis*, bagaimana persiapan dan peralihan penerapan SAI berbasis akruaI atau implementasi PP 71 tahun 2010 di politeknik negri pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu, deskriptif naratif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah reformasi pengelolaan keuangan negara di bidang akuntansi pada saat ini adalah menetapkan peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eliadi Herwiyanti (2017). Dengan judul penelitian “ Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada InspektoraI JendraI KementeriaI Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan penerapan SAP Berbasis AkruaI di Instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan itjen kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akruaI sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winesthy Marizcha Alfons(2016) dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Di Dinas Perhubungan Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi aset pada dinas perhubungan kota

manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset sudah sesuai dengan permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Mulalinda (2014) dengan judul “ Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas PPKAD di kabupaten sitaro. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas PPKAD kabupaten sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty Gino Rasyid (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Atas Aset Tetap Pada Pt. Sederhana Karya Jaya Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan perusahaan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) bab 15 tentang aset tetap. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara memahami informasi keuangan yang ada di perusahaan dan membandingkannya dengan teori. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan penerapan akuntansi atas aset tetap oleh perusahaan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) bab 15

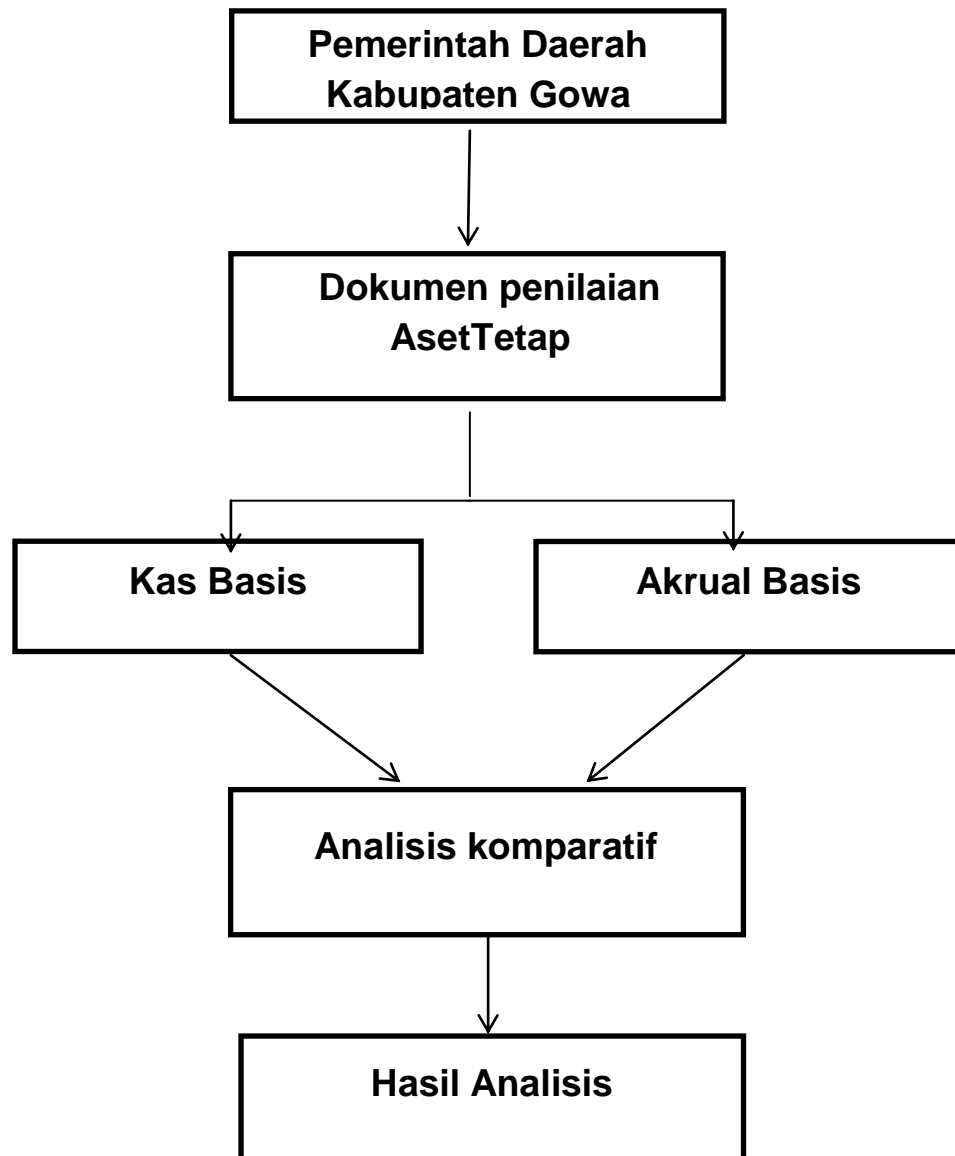
seperti dalam hal pencatatan pengukuran, pelepasan, dan penyajian aset tetap.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) dengan judul “ Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis;

1. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi Pearson terhadap variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dan implementasi sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan.

I. Kerangka Konsep



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran sistem akuntansi aset tetap milik daerah, dokumen laporan keuangan daerah serta data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada data aset tetap dan jumlah aset tetap yang ada pada kantor pemerintah daerah kabupaten Gowa.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian di Kantor Bupati Gowa yang terletak di Jl. Masjid Raya No.30, kelurahan Sungguminasa, kecamatan Somba Opu, kota Gowa, provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 3.1
Lokasi Penelitian

2. Penulis mengupayakan penelitian selama dua bulan, mulai dari bulan April sampai Juni.

Tabel 3.1
Skedul Penelitian

		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
	a. Observasi	■																							
	b. Identifikasi Masalah		■																						
	c. Penentuan Tindakan		■																						
	d. Pengajuan Judul		■																						
	e. Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
f. Pengajuan Izin Penelitian													■												
2	Pelaksanaan																								
	a. Seminar Proposal												■	■											
	b. Pengumpulan Data Penelitian													■	■	■	■								
3	Penyusunan Laporan																								
	a. Penulisan Laporan																			■	■	■	■		
	b. Ujian Skripsi																							■	

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan di dalam kegiatan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung peneliti ini.

2. Observasi lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan mengamati laporan keuangan mengenai aset tetap. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai bahan informasi atas data peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat ukur, dilihat dari PSAP 07 adalah “mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap.

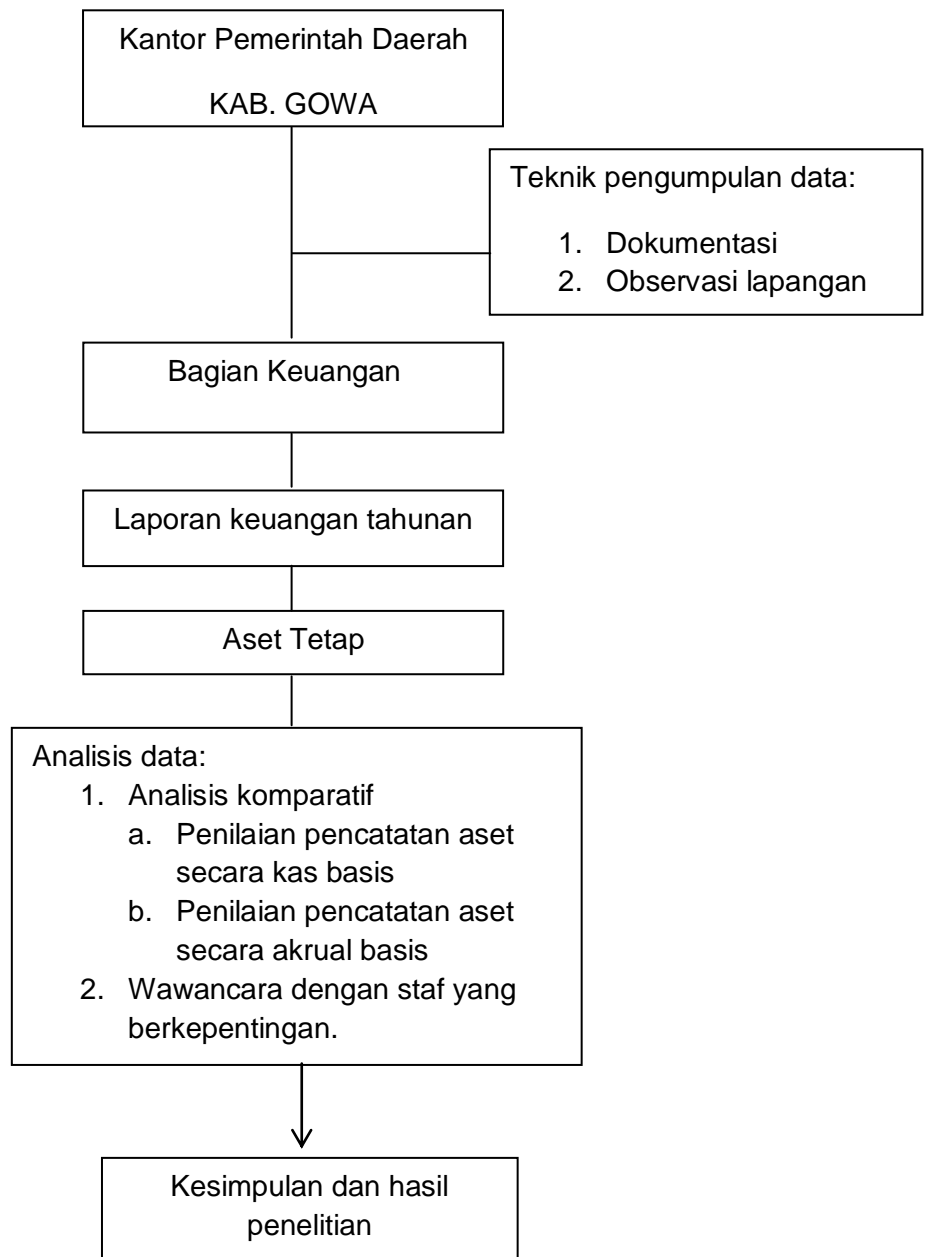
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menepatkan fokus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306)

G. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang

diperoleh sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

H. Alur Penelitian



Gambar 3.2
Alur Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terbentuk pada Bulan Maret Tahun 2009 yang merupakan gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang pembelanjaan/pencairan anggaran dan penyusunan anggaran Pemerintah Dearah Kabupaten Gowa.

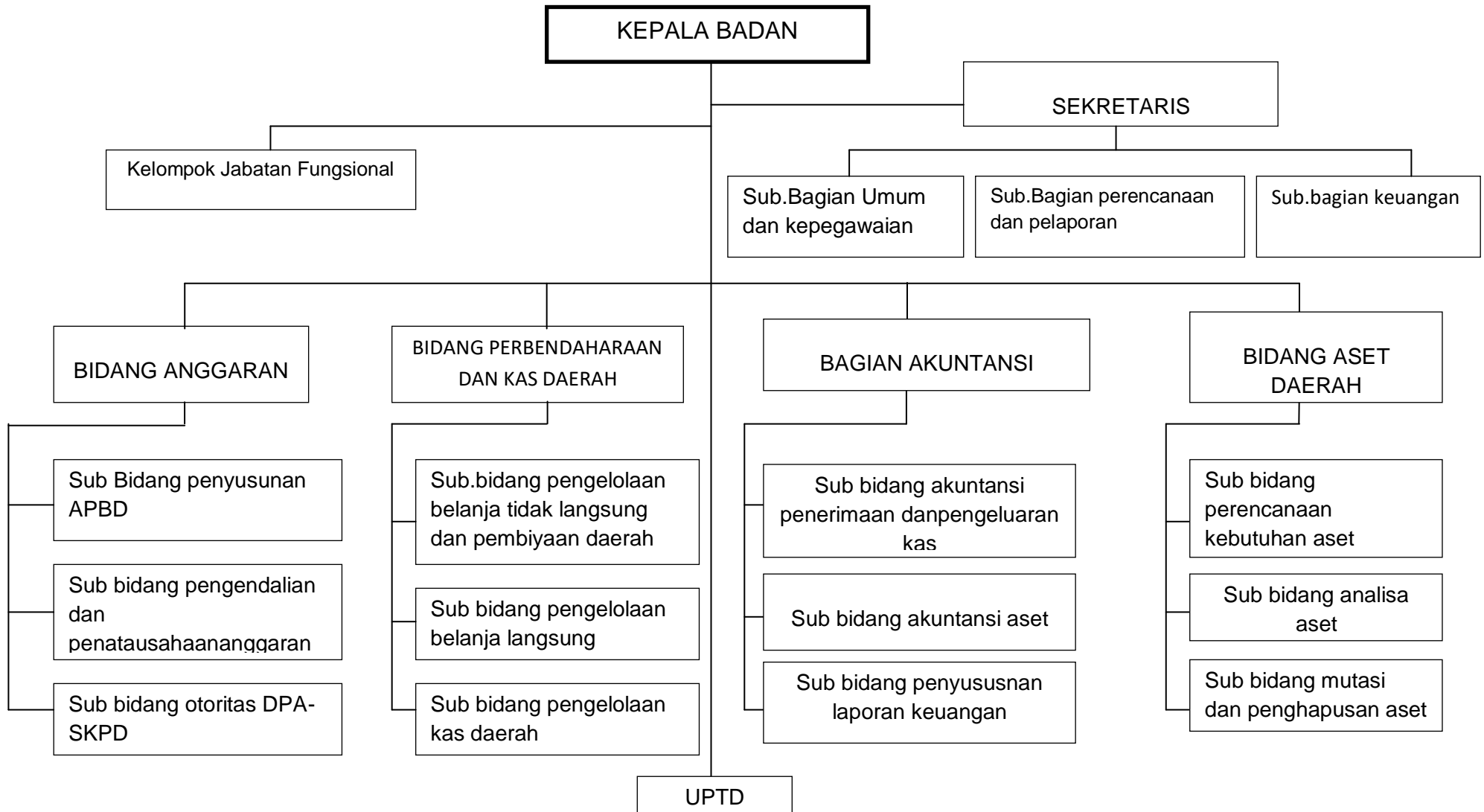
Latar belakang terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dapat mempermudah koordinasi antara ketersediaan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah dengan

kebutuhan anggaran belanja daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa setiap tahunnya.

Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa Otonomi Daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten / Kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten adalan di Sulawesi Selatan.

Sebagai daerah percontohan otonomi daerah secara logis akan mempunyai tanggungjawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan demikian disadari semakin besarnya permasalahan yang akan dihadapi sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks tentu bukan berimplikasi pada peningkatan jumlah pendanaan yang semakin besar. Guna mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka pemerintah daerah di tuntut untuk berupaya seoptimal mungkin untuk menggali sumber-sumber pendapatan guna membiayai sendiri Kabupaten di daerahnya.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA



2. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub. Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Anggaran;
 - a) Sub. Bidang Penyusunan APBD;
 - b) Sub. Bidang Pengendalian Dan Penatausahaan Anggaran;
 - c) Sub. Bidang Otoritas DPA - SKPD;
- 4) Bidang Perbendaharaan;
 - a) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah;
 - b) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
 - c) Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- 5) Bidang Akuntansi;
 - a) Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas;
 - b) Sub. Bidang Akuntansi Aset;
 - c) Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
- 6) Bidang Aset Daerah;
 - a) Sub. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset;
 - b) Sub. Bidang Analisa Aset;
 - c) Sub. Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset;
- 7) Jabatan Fungsional.

3. Job Description

1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b) pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

- c) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- 4) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- 5) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
- a) perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;
 - d) pelaksanaan administrasi Bidang Anggaran;
- 6) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 7) Sub. Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan pengendalian dan penatausahaan anggaran.
- 8) Sub. Bidang Otoritas DPA-SKPD dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan otorisasi DPA-SKPD.
- 9) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah.
- 10) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- 11) Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja langsung.
- 12) Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Kas Daerah.

- 13) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah.
- 14) Sub. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam perencanaan kebutuhan aset.
- 15) Sub. Bidang Analisa Aset dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan analisa aset.
- 16) Sub. Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan mutasi dan penghapusan aset.
- 17) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 18) Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
- 19) Sub. Bidang Akuntansi Aset dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan pelaporan akuntansi aset.
- 20) Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah

B. Penyajian Data (Hasil dari penelitian)

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi *cash basis* menuju *accrual*. dalam akuntansi, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Pada praktek akuntansi pemerintahan kabupaten Gowa basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 07 yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penilaian tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Dapat dilihat dari tabel dibawa ini mengenai pengakuan, penilaian serta pengukuran aset tetap PSAP No.07. pada pemerintah daerah kabupaten gowa.

Tabel 4.1
Pengakuan, Penilaian, Pengukuran Aset tetap PSAP No.07 pada
Pemerintah Kabupaten Gowa

NO	Pemerintah kabupaten gowa	PSAP No.07	Keterangan
1.	Pengakuan Aset Pada pemerintah daerah kab.Gowa dapat diakui sebagai aset jika mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan dan pada saat pengakuan aset lebih andal jika terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.	Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Dapat dikatakan bahwa pengakuan aset di pemerintah daerah kab. Gowa telah sesuai dengan PSAP No.07
2.	Penilaian Aset Pada pemerintah daerah kab.Gowa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Dapat dikatakan bahwa pengakuan aset di pemerintah daerah kab. Gowa telah sesuai dengan PSAP No.07
3.	Pengukuran Aset Pada pemerintah daerah kab.Gowa Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi	Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan	Dapat dikatakan bahwa pengakuan aset di pemerintah daerah kab. Gowa telah sesuai dengan

	bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.	dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan	PSAP No.07
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018 (diolah)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah kab. Gowa telah menerapkan sebagai mana mestinya yang telah diatur dalam PSAP No.07 yang mengatur Aset tetap, yang dimana diketahui aset tetap diakui bila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau di manfaatkan oleh masyarakat umum, dan penilaian pada Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, serta pengukuran aset dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian

neraca, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Adapun laporan neraca yang di sajikan pada pemerintah kabupaten Gowa pada saat menggunakan sistem pencatatan *cash basis* yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011 dan pada tahun 2012, 2013 pemerintah kabupaten gowa menggunakan sistem pencatatan *cash to accrual* dan saat mulai diterapkannya sistem *accrual basis* pada tahun 2014 sampai saat ini. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini di sajikan laporan Asset pada saat menggunakan metode *cash basis* tahun 2009, 2010 dan pada tahun 2011.

Tabel 4.2
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2009

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2009	
Asset Tetap	Tahun 2009 (Rp)
Tanah	524,401,146,500.00
Peralatan dan mesin	121,447,844,630.00
Gedung dan bangunan	338,731,938,502.30
Jalan, irigasi dan jaringan	992,295,429,594.40
Aset tetap lainnya	7,303,513,600.40
Kontruksi dalam pekerjaan	30,349,886,700.00
Akumulasi peny. Aset Tetap	0.00
Jumlah asset tetap	2,014,529,759,527.10

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Tabel 4.3
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2010

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2010	
Asset Tetap	Tahun 2010 (Rp)
Tanah	524,926,581,500.00
Peralatan dan mesin	136,896,014,947.00
Gedung dan bangunan	382,722,784,213.30
Jalan, irigasi dan jaringan	1,102,234,326,347.85
Aset tetap lainnya	7,701,768,225.40
Kontruksi dalam pekerjaan	58,064,999,850.00
Akumulasi peny. Aset Tetap	0.00
Jumlah asset tetap	2,212,546,475,083.55

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Tabel 4.4
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2011

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2011	
Asset Tetap	Tahun 2011 (Rp)
Tanah	536.067.760.076
Peralatan dan mesin	136.057.746.443
Gedung dan bangunan	365.232.196.773
Jalan, irigasi dan jaringan	1.175.686.926.635
Aset tetap lainnya	23.166.274.971
Kontruksi dalam pekerjaan	61.141.131.217
Akumulasi peny. Aset Tetap	0.00
Jumlah Asset tetap	2.297.352.036.119

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Laporan keuangan yang disajikan pada tabel diatas pada masa periode tahun 2009, 2010 dan pada tahun 2011 terkait aset tetap, yang masih menggunakan pencatatan *cash basis* yang memiliki keunggulan dimana metode ini digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Biaya belum diakui sampai adanya pembyaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam menghitung pendapatan, pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya, penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan, laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut. Terkait data yang disajikan pada tabel diatas mengenai data aset tetap yang ada di pemerintahan Kabupaten Gowa, yang termasuk diantaranya:

1. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2009, tanah Rp.524,401,146,500 dan pada tahun 2010 tanah Rp.524,926,581,500 serta pada tahun 2011 Rp.536.067.760.076 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.
2. Peralatan dan mesin, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat

pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas peralatan dan mesin pada tahun 2009, Rp. 121,447,844,630.00 dan pada tahun 2010 peralatan dan mesin Rp. 136,896,014,947.00 serta pada tahun 2011 Rp.136.057.746.443 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.

3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2009, Gedung dan bangunan Rp.338,731,938,502.30 dan pada tahun 2010 gedung dan bangunan Rp.382,722,784,213,30 serta pada tahun 2011 Rp.365.232.196.773 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasi oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2009, Jalan, irigasi dan jaringan Rp.992,295,429,594.40 dan pada tahun 2010 jalan, irigasi dan jaringan Rp.1,102,234,326,347,85 serta pada tahun 2011 Rp.1.175.686.926.635 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.
5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah

daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2009, Aset tetap lainnya Rp.7,303,513,600.40 dan pada tahun 2010 Aset tetap lainnya Rp.7,701,768,225.40 serta pada tahun 2011 Rp.23.166.274.971 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.

6. Kontruksi dalam pekerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2009, Kontruksi dalam pekerjaan Rp.30,349,886,700.00 dan pada tahun 2010 Kontruksi dalam pekerjaan Rp. 58,064,999,850.00 serta pada tahun 2011 Rp.61.141.131.217 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2009, 2010 dan 2011.

7. Akumulasi peny. Aset tetap, aset tetap disusutkan karena seiring berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan jasa. Dari tabel diatas tidak terdapat nominal atas penyusutan karena pada saat penggunaan *cash basishanya* berbicara menyangkut aliran kas yang masuk dan kas keluar sedangkan jika berbicara penyusutan hanya menyangkut beban.

Adapun laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Gowa yang sudah menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* yang di sajikan pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.5
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2014

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2014	
Asset Tetap	Tahun 2014 (Rp)
Tanah	536,660,187,217,00
Peralatan dan mesin	195,553,066,614.00
Gedung dan bangunan	667,592,062,794.00
Jalan, irigasi dan jaringan	1,686,378,458,441.00
Aset tetap lainnya	39,090,357,284.00
Kontruksi dalam pekerjaan	4,821,814,153.00
Akumulasi peny. Aset Tetap	(987,907,227,921.00)
Jumlah Asset tetap	2,142,168,680,582.00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Tabel 4.6
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2015

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2015	
Asset Tetap	Tahun 2015 (Rp)
Tanah	596,672,806,251.14
Peralatan dan mesin	239,364,995,060.95
Gedung dan bangunan	711,890,576,825.87
Jalan, irigasi dan jaringan	1,937,032,782,627.28
Aset tetap lainnya	47,091,665,084.56
Kontruksi dalam pekerjaan	51,779,454,253.89
Akumulasi peny. Aset Tetap	(1,063,907,372,106.86)
Jumlah Asset tetap	2,519,924,907,996.83

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Tabel 4.7
Asset Pemerintah Kab.Gowa 2016

Kabupaten Gowa Asset Per 31 Desember Tahun 2016	
Asset Tetap	Tahun 2016 (Rp)
Tanah	598.685.806.251,14
Peralatan dan mesin	278.962.713.547,86
Gedung dan bangunan	798.404.952.512,37
Jalan, irigasi dan jaringan	2.269.260.389.903,52
Aset tetap lainnya	58.129.581.150,00
Kontruksi dalam pekerjaan	22.611.938.844,78
Akumulasi peny. Aset Tetap	(1.242.356.557.153,94)
Jumlah Asset tetap	2.783.696.823.028

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Pada tabel diatas disajikan laporan neraca yang sudah menggunakan pencatatan *accrual basis* terkait aset tetap, yang memiliki keunggulan dimana metode ini bisa digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas. Terkait data yang disajikan pada tabel diatas mengenai data aset tetap yang ada di pemerintahan Kabupaten Gowa, yang termasuk diantaranya yaitu :

- 1 Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, tanah Rp.536,660,187,217,00 dan pada tahun 2015 tanah Rp.596,672,806,251.14serta pada tahun 2016 Rp.598.685.806.251,14 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

- 2 Peralatan dan mesin, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, peralatan dan mesin Rp.195,553,066,614.00 dan pada tahun 2015 peralatan dan mesin Rp. 239,364,995,060,95 serta pada tahun 2016 Rp.278.962.713.547,86 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2014, 2015 dan 2016.
- 3 Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, Gedung dan bangunan Rp. 667,592,062,749,00 dan pada tahun 2015 gedung dan bangunan Rp. 711,890,576,825,87 serta pada tahun 2016 Rp.798.404.952.512,37 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2014, 2015 dan 2016.
- 4 Jalan, irigasi dan jaringan, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasi oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, Jalan, irigasi dan jaringan Rp.1,686,378,458,441,00 dan pada tahun 2015 jalan, irigasi dan jaringan Rp.1,937,032,782,627,28 serta pada tahun 2016 Rp.2.269.260.389.903,52 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

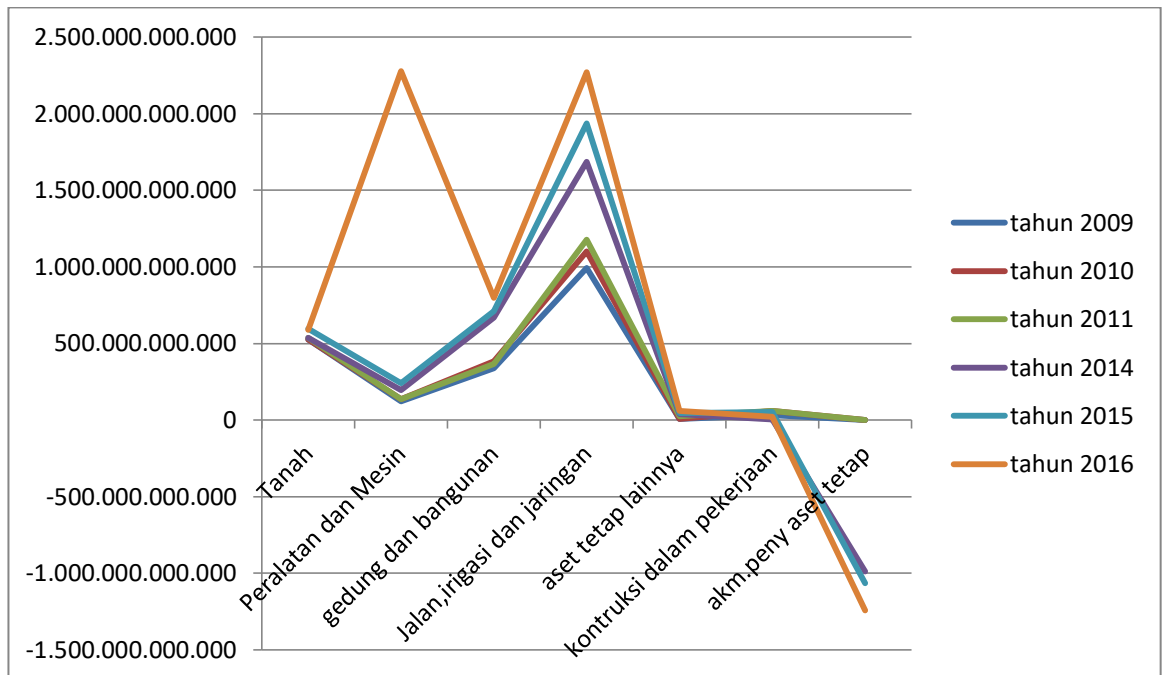
- 5 Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, Aset tetap lainnya Rp. 39,090,357,284,00 dan pada tahun 2015 Aset tetap lainnya Rp.47,091,665,084,56 serta pada tahun 2016 Rp.58.129.581.150,00 yang memiliki peningkatan anggaran dari tahun 2014, 2015 dan 2016.
- 6 Kontruksi dalam pekerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah kab. Gowa diatas pada tahun 2014, Kontruksi dalam pekerjaan Rp.4,821,814,153,00 dan pada tahun 2015 Kontruksi dalam pekerjaan Rp.51,779,454,253,89 serta pada tahun 2016 Rp.22.611.938.844,78.
- 7 Akumulasi peny. Aset tetap, aset tetap disusutkan karena seiring berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam memberikan jasa. Adapun akumulasi penyusutan dari tabel neraca diatas pada tahun 2014 (Rp.987,907,227,921.00) dan pada tahun 2015 memiliki penyusutan (Rp.1,063,907,372,106,86) serta pada tahun 2016 Rp.(1.242.356.557.153,94).

Serta dapat dilihat tabel perbandingan sistem pencatatan saat menggunakan *cash basis*(2009,2010,11) dan pada saat menggunakan *accrual basis* pada tahun (2014,2015,16).

Tabel 4.8
Perbandingan Asset *Cash Basis* dan *Accrual Basis*

No	URAIAN	Tahun2009 (Rp)	Tahun2010 (Rp)	Tahun2011 (Rp)	Tahun2014 (Rp)	Tahun2015 (Rp)	Tahun2016 (Rp)
1	Tanah	524.401.146.500	524.926.581.500	536.067.760.076	536.660.187.217	596.672.806.251	589.658.806.251
2	peralatan dan mesin	121.447.844.630	136.896.014.947	136.057.746.443	195.553.066.614	239.364.995.060	2278.962.713.547
3	gedung dan bangunan	338.731.938.502	382.722.784.213	365.232.196.773	667.592.062.794	711.890.576.825	798.404.952.512
4	jalan, irigasi dan jaringan	992.295.429.594	1.102.234.326.347	1.175.686.926.635	1.686.378.458.441	1.937.032.782.627	2.269.206.389.930
5	aset tetap lainnya	7.303.513.600	7.701.768.225	23.166.274.971	39.090.357.284	47.091.665.084	58.129.581.150
6	kontruksi dalam pekerjaan	30.349.886.700	58.064.999.850	61.141.131.217	4.821.814.153	51.779.454.253	22.611.936.844
7	akm. Peny aset tetap	0	0	0	(987.907.227.921)	(1.063.907.372.106)	(1.242.356.557.153)
	Jumlah	2.014.529.759.527	2.212.546.475.083	2.297.352.036.119	2.142.168.680.582	2.519.924.907.996	2.783.696.823.028

Sumber:Pemerintah Kabupaten Gowa 2018 (diolah)



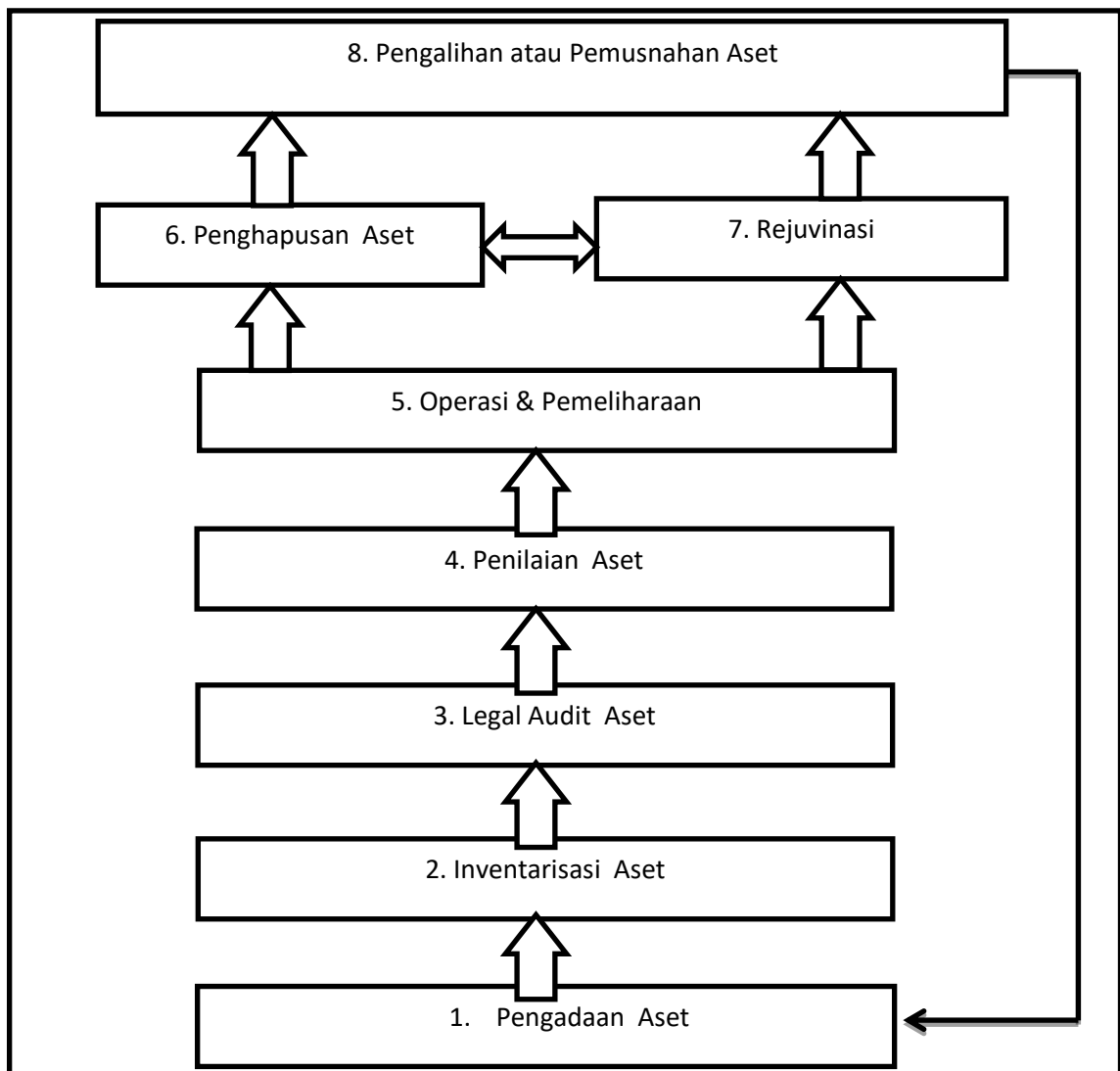
Sumber : Pemerintah Kabupaten Gowa 2018 (diolah)

Gambar 4.2
Grafik AssetCash Basis dan Accrual Basis

Dapat dilihat dari tabel serta grafik diatas Pada pencatatan aset tetap dengan menggunakan sistem *cash basis* maupun *accrual basis* memiliki anggaran yang setiap tahunnya bertambah namun pada saat menggunakan sistem pencatatan *cash basis* wajib dilakukan, namun tidak demikian halnya dengan penyusutan, penyusutan boleh dilakukan namun tidak wajib. Pada saat pencatatan menggunakan *cash basis* yang dilakukan hanya berfokus pada penerimaan dan belanja, atau biasa dikenal dengan akuntansi basis kas. Mencatat aset tetap tanpa kewajiban melakukan penyusutan, sehingga aset tetap tersaji berdasarkan biaya perolehannya. Keuntungan dari tidak diwajibkannya melakukan penyusutan adalah menurunkannya tingkat kerumitan, pemerintah daerah tidak perlu menghitung beban penyusutan dan menjaga data akun akumulasi penyusutan. Berbeda dengan diberlakukannya

sistem pencatatan *accrual basis*, pencatatan aset tetap dengan wajib melakukan penyusutan. Dimana penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap, penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca.

Siklus Aset



Sumber : Pemerintah Kabupaten Gowa 2018

Gambar 4.3Skema Alur
Manajemen Aset

Adapun penjelasan dari setiap langkah dalam siklus hidup aset yang telah digambarkan pada gambar 4.3 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Aset : Kegiatan pengadaan (barang dan jasa) adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/ barang maupun jasa baik yang dibiayai oleh sendiri maupun yang dibiayai oleh pihak luar atau dilaksanakan secara swakelola (sendiri), maupun oleh penyedia barang dan jasa.
2. Inventarisasi Aset : Rangkaian kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset secara fisik non fisik, dan secara yuridis / legal. melakukan kodifikasi dan mendokumentasikannya untuk kepentingan pengelolaan aset bersangkutan.
3. Legal Audit Aset : Kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur penguadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.
4. Penilaian Aset : Sebuah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan.
5. Operasi dan Pemeliharaan Aset : Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan aset dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemeliharaan aset adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk aset agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan harapan.

6. Penghapusan Aset: Kegiatan untuk menjual, menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki.
7. Rejuvenasi Aset / Review : Upaya peremajaan aset dengan tujuan aset dapat didayagunakan kembali sebelum umur ekonomisnya habis. Peremajaan ini dapat berupa perbaikan menyeluruh ataupun penggantian suku cadan dengan tujuan aset dapat beroperasi seperti pada keadaan semula.
8. Pengalihan Aset: Upaya memindahkan hak dan atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja audit yang lainnya di lingkungan sendiri.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dilihat dari PSAP 07 yang dimana mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap, yang dimana pengakuan, penilaian serta pengukuran pada pemerintah daerah kabupaten Gowa telah menerapkan sebagai mana mestinya yang telah diatur dalam PSAP No.07 yang mengatur Aset tetap. Neraca yang memuat jumlah aset tetap yang tercatat pada laporan keuangan di pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang pada saat menggunakan sistem pencatatan *cash basis* dan *accrua basis* mengenai aset tetap yang terdapat pada laporan keuangantabel 4.9, yang memiliki anggaran yang dari tahun ke tahun meningkat baik itu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aseptetaplainnyadankontruksi.

Tabel 4.9
Laporan keuangan Asset Tetap

URAIAN	2009	2010	2011	2014	2015	2016
Tanah	524.401.146.500	524.926.581.500	536.067.760.076	536.660.187.217	596.672.806.251	589.658.806.251
peralatan dan mesin	121.447.844.630	136.896.014.947	136.057.746.443	195.553.066.614	239.364.995.060	2278.962.713.547
gedung dan bangunan	338.731.938.502	382.722.784.213	365.232.196.773	667.592.062.794	711.890.576.825	798.404.952.512
jalan, irigasi dan jaringan	992,295,429,594	1.102.234.326.347	1.175.686.926.635	1.686.378.458.441	1.937.032.782.627	2.269.206.389.930
aset tetap lainnya	7.303.513.600	7.701.768.225	23.166.274.971	39.090.357.284	47.091.665.084	58.129.581.150
kontruksi dalam pekerjaan	30.349.886.700	58.064.999.850	61.141.131.217	4.821.814.153	51.779.454.253	22.611.936.844
akm. Peny aset tetap	0	0	0	(987.907.227.921)	(1.063.907.372.106)	(1.242.356.557.153)

Adapun yang membedakan dari kedua sistem pencatatan tersebut dilihat dari penyusutannya, yang dimana pada saat penggunaan sistem pencatatan *cash basis* hanya berbicara menyangkut aliran kas masuk dan keluar sedangkan jika berbicara mengenai penyusutan tidak menyangkut aliran kas tetapi mengenai beban, Pada saat pencatatan yang dilakukan hanya berfokus pada penerimaan dan belanja, atau biasa dikenal dengan akuntansi basis kas. Mencatat aset tetap tanpa kewajiban melakukan penyusutan, sehingga aset tetap tersaji berdasarkan biaya perolehannya. Berbeda dengan sistem pencatatan pada saat *accrual basis* yang dimana pencatatan aset tetap dengan wajib melakukan penyusutan. Dimana penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap, penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca.

Pada sistem pencatatan *cash basis* mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan tanpa melihat kapan transaksi tersebut timbul atau terjadi. Misalkan pada pengakuan pendapatan diakui ketika uang kas atau setara kas diterima bukan ketika adanya hak atas pendapatan tersebut timbul, sedangkan dari segi belanja diakui ketika terjadi pembayaran bukan ketika terjadi kewajiban untuk membayar timbul. Dan pada basis kas pembelian aset jangka panjang tidak di kapitulasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan seperti yang disajikan pada tabel diatas yang masa periode pada tahun 2009, 2010 dan 2011.

Sedangkan pada sistem pencatatan *accrual basis* itu sendiri, dimana basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau di bayarkan yang artian kata saat mengakui adanya pendapatan pada saat mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan, sedangkan dari pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, sehingga ini dapat dianggap sebagai awal munculnya biaya tersebut belum dibayar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuri Rahayu (2015), Risnaningsih (2016), Dita Puspita Sari dan Hendrawan Santoso Putra(2012), Baries Feryono (2017), Sari Zawitri (2015), Eliadi Herwiyanti (2017) yang menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah berbasis *accrual* merupakan suatu inovasi dalam unit administrasi publik, basis *accrual* diaplikasikan sebagai dasar pencatatan laporan anggaran dan laporan keuangan karena memiliki banyak manfaat dari pada basis *cash*. saat ini, implementasi basis *accrual* menjadi tren dalam sektor pemerintah di berbagai negara. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winesthy Marizscha Alfons (2016), Veronika Mulalinda (2014), Fatmawaty Gino Rasyid (2016), Rukmi Juwita (2013) yang menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Aset tetap milik daerah di pemerintah daerah Kabupaten Gowa terkait aset tetap yang pada saat menggunakan sistem pencatatan *cash basis* dan *accrua basis* mengenai aset tetap yang terdapat pada laporan keuangan, adapun yang membedakan dari kedua sistem pencatatan tersebut dilihat dari penyusutannya, yang dimana pada saat penggunaan sistem pencatatan *cash basishanya* berbicara menyangkut aliran kas masuk dan keluar sedangkan jika berbicara mengenai penyusutan tidak menyangkut aliran kas tetapi mengenai beban. Pada saat pencatatan yang dilakukan hanya berfokus pada penerimaan dan belanja, atau biasa dikenal dengan akuntansi *basiskas*. sehingga aset tetap tersaji berdasarkan biaya perolehannya. Berbeda dengan sistem pencatatan pada saat *accrual basis* yang dimana pencatatan aset tetap dengan wajib melakukan penyusutan. Dimana penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap, penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pada peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah jumlah objek penelitian, bukan hanya mengenai metode pencatatan aset tetap, sehingga dapat membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Winesthy M A, et al. 2016. Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Perhubungan Manado. *Berkah Ilmiah Efisiensi*. Vol.16.
- Basri, I. 2004. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Beechy, T.H. 2007. Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability The Innovation. *The Public Sector Inovation Jurnal*. Vol. 12.
- Binsar H. Simanjuntak. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor pemerintah di Indonesia*. Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia: Jakarta.
- Blondal, Jon R. 2003. Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent Developments Journal. Vol. 3 No. 1. *OECD*.
- Departemen Dalam Negeri. 2008. *Surat Edaran Ditjen BAKD no. 900/316/BAKD tentang Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD*. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi: Yogyakarta.
- Ferryono, Baries dan Sutaryo. 2017. Manfaat Akuntansi Basis Akrua dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *JDAB*. Vol.4.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Herwiyanti, Eliadi dkk. 2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektoral Jendral Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.19.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Revisi: Jakarta.
- Juwita, Rukmi. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi*. *Trikonomika*. Vol. 12.
- Kah, A.M. 2009. *Transition to Accrual Accounting*. International Monetary Fun, Fiscal Affarch Department.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Jakarta.

- Mulandia, Veronika. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *EMBA*. Vol. 2.
- Peraturan Pemerintah No.71. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 17 terhadap Aset Tetap*.
- Rahayu, Yuri. 2015. Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis. *Ecodemica*.Vol. 3.
- Rasyid, Fatmawati G. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi atas Aset Tetap pada PT. Sederhana Karya Jaya Manado. *EMBA*. Vol. 4.
- Risnarningsih. 2016. Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. *EKSIS*.Vol. 11.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga: Jakarta.
- Syadza, Abine. 2013. Sekilas Perbedaan Cash Toward Accrual (CTA) Basis dengan Accrual Basis.<https://abusyadza.wordpress.com/2013/06/14/sekilas-perbedaan-cash-toward-accrual-cta-basis-dengan-accrual-basis/>. Diakses 15 Februari 2018.
- Sari, Dita P. 2012. Menelisik Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. *JEAM*. Vol. 11.
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Afa Beta.
- Sri, Suryanovi. 2008. Jurnal Kementerian Keuangan RI Cash Basis dan Accrual Basis. *Akuntansi Pemerintah*. Vol. 3.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Deepublish. Yogyakarta.
- Widjarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis AkruaI Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/6802838/Akuntansi-Berbasis-AkruaI.zip.html>. Diakses 10 Februari2012.
- Zawitri, Sari dkk. 2015. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada Politeknik Negri. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 4.

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	2	3	4
ASET	5.1.3.1		
ASET LANCAR	5.1.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.1.3.1.1.1	119,585,924,861.73	145,541,614,378.79
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.3.1.1.2	1,240,923,517.00	1,868,432,342.00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.3.1.1.3	3,576,308.00	602,986,413.94
Kas Lainnya	5.1.3.1.1.4	327,529,529.00	0.00
Kas di Bendahara JKN	5.1.3.1.1.5	1,498,147,890.00	620,273,282.00
Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
Piutang Pajak	5.1.3.1.1.6	24,647,005,776.00	21,352,744,489.00
Penyisihan Piutang Pajak		(9,645,442,815.35)	0.00
Piutang Pajak Netto		15,001,562,960.65	0.00
Piutang Retribusi	5.1.3.1.1.7	3,378,713,873.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi		(16,893,569.36)	0.00
Piutang Retribusi Netto		3,361,820,303.64	0.00
Belanja (Beban) Dibayar Dimuka	5.1.3.1.1.8	552,944,941.22	0.00
Bagian Lancar Tangihan Penjualan Angsuran	5.1.3.1.1.9	36,800,000.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		(9,080,000.00)	0.00
Bagian Lancar Tangihan Penjualan Angsuran Netto		27,720,000.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.3.1.1.10	0.00	1,991,726,105.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		0.00	0.00
Piutang Lainnya	5.1.3.1.1.11	31,348,715,122.38	8,247,985,320.38
Penyisihan Piutang Lainnya		(5,832,099,346.20)	0.00
Piutang Lainnya Netto		25,516,615,776.18	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0.00	(4,645,565,096.30)
Persediaan	5.1.3.1.1.12	9,865,699,833.00	9,147,531,414.00
JUMLAH ASET LANCAR		176,982,465,920.42	184,727,728,648.81
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.1.3.1.2.1		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		2,644,925,021.00	2,660,925,021.00
Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	154,850,000.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		2,644,925,021.00	2,815,775,021.00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		33,421,510,128.00	13,065,323,941.00
Investasi Permanen Lainnya		9,054,000,000.00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		42,475,510,128.00	13,065,323,941.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		45,120,435,149.00	15,881,098,962.00
ASET TETAP	5.1.3.1.3		
Tanah	5.1.3.1.3.1	596,672,806,251.14	536,660,187,217.00

URAIAN	Ref CaLK	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin	5.1.3.1.3.2	239,364,995,060.95	195,533,060,614.00
Gedung dan Bangunan	5.1.3.1.3.3	711,890,576,825.87	667,592,062,794.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.1.3.4	1,937,032,782,627.28	1,686,378,458,441.00
Aset Tetap Lainnya	5.1.3.1.3.5	47,091,665,084.56	39,090,375,284.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan ✓	5.1.3.1.3.6	51,779,454,253.89	4,821,814,153.00
Akumulasi Penyusutan	5.1.3.1.3.7	(1,063,907,372,106.86)	(987,907,277,921.00)
JUMLAH ASET TETAP		2,519,924,907,996.83	2,142,168,680,582.00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.1.3.1.4	13,159,510,764.93	12,906,066,630.93
JUMLAH DANA CADANGAN		13,159,510,764.93	12,906,066,630.93
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	5.1.3.1.5	47,084,125,203.50	40,038,345,204.00
Akumulasi Amortisasi	5.1.3.1.5.1	(22,169,589,526.75)	(16,815,959,489.00)
Aset Tak Berwujud Netto		24,914,535,676.75	
Aset Lain-lain	5.1.3.1.5.2	95,937,510,789.45	83,734,649,962.00
JUMLAH ASET LAINNYA		120,852,046,466.20	106,957,035,677.00
JUMLAH ASET		2,876,039,366,297.38	2,462,640,610,500.74
KEWAJIBAN	5.1.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.3.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	5.1.3.2.1.1	0.00	925,153,535.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.3.2.1.2	82,490,654.00	5,450,167.00
Utang Bunga	5.1.3.2.1.3	397,079,625.00	397,079,625.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.1.3.2.1.4	0.00	2,660,925,021.00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.2.1.5	400,994,646.00	0.00
Utang Beban	5.1.3.2.1.6	2,889,082,674.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.2.1.7	9,024,169,482.00	2,147,118,924.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12,793,817,081.00	6,135,727,272.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.1.3.2.2		
Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		12,793,817,081.00	6,135,727,272.00
EKUITAS DANA	5.1.3.3		
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			148,024,869,835.79
Pendapatan yang Ditangguhkan			602,986,413.94
Cadangan Piutang			26,946,890,818.08
Cadangan Persediaan			9,147,531,414.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			(6,130,277,105.00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR			178,592,001,376.81
EKUITAS DANA INVESTASI			
Dilinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang			15,881,098,962.00
Dilinvestasikan dalam Aset Tetap			2,142,168,680,582.00
Dilinvestasikan dalam Aset Lainnya			106,957,035,677.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang			0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI			2,265,006,815,221.00
EKUITAS DANA CADANGAN			

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2015	TAHUN 2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dilvestasikan dalam Dana Cadangan			12,906,066,630.93
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN			12,906,066,630.93
JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA			2,456,504,883,228.74
JUMLAH EKUITAS		2,863,245,549,216.38	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,876,039,366,297.38	2,462,640,610,500.74

BUPATI GOWA ,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH.



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	125.973.484.650,33	119.585.924.861,73
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	3.576.308,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	654.270.750,00	1.240.923.517,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	1.477.748.873,00	1.498.147.890,00
Kas Di Bendahara JKN	1.675.517.277,00	327.529.529,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	54.812.378.810,00	52.631.631.573,00
Piutang Lainnya	6.720.603.198,38	6.779.603.198,38
Penyisihan Piutang	(16.571.683.199,60)	(15.503.515.730,92)
Beban Dibayar Dimuka	592.377.806,28	552.944.941,22
Persediaan	11.148.600.807,86	9.865.699.833,00
JUMLAH ASET LANCAR	186.483.298.973,25	176.982.465.920,41
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	55.144.796.229,13	33.421.510.128,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	9.054.000.000,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	55.144.796.229,13	42.475.510.128,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	57.789.721.250,13	45.120.435.149,00
ASET TETAP		
Tanah	598.685.806.251,14	596.672.806.251,14
Peralatan dan Mesin	278.962.713.547,86	239.364.995.060,95
Gedung dan Bangunan	798.404.952.512,37	711.890.576.825,87
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.269.260.389.930,52	1.937.032.782.627,28
Aset Tetap Lainnya	58.129.581.150,00	47.091.665.084,56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.611.936.844,78	51.779.454.253,89
Akumulasi Penyusutan	(1.242.356.557.153,94)	(1.063.907.372.106,86)
JUMLAH ASET TETAP	2.783.698.823.082,73	2.519.924.907.996,83
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	13.418.794.040,93	13.159.510.764,93
JUMLAH DANA CADANGAN	13.418.794.040,93	13.159.510.764,93
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	52.612.734.781,12	47.084.125.203,50
Aset Lain-lain	104.915.992.544,45	95.937.510.789,45
Akumulasi Amortisasi	(28.265.451.460,90)	(22.169.589.526,76)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(98.072.669.182,62)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	31.190.606.682,06	120.852.046.466,19
JUMLAH ASET	3.072.581.244.029,09	2.876.039.366.297,36
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.175.614,00	82.490.654,00
Utang Bunga	392.079.625,00	397.079.625,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	478.437.611,67	400.994.646,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	881.692.250,67	880.564.925,00

KABUPATEN GOWA
NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2009 DAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2010

No. Urt	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2010 (Rp)
1	2	3	4
I.	AKTIVA		
1	AKTIVA LANCAR		
1	Kas		
	- Kas Di kas Daerah	48,432,002,606.59	57,800,900,326.48
	- Deposito	18,000,000,000.00	25,000,000,000.00
	- Kas Di Kas Penerimaan	10,675,121,392.66	129,694,859.22
	- Kas Di Bendahara Pengeluaran	7,125,152,096.00	5,022,384,462.00
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
2	Piutang		
	Piutang Pajak	0.00	128,144,000.00
	Piutang Retribusi	161,745,006.00	252,294,150.00
	Piutang Dana Perimbangan	0.00	5,501,160,256.00
	Piutang Lain-lain	7,811,297,330.38	7,535,199,270.38
3	Persediaan Bahan Pakai Habis Habis/ Material	3,556,287,656.00	7,302,312,493.00
	Jumlah Aktiva Lancar	95,761,606,087.63	108,672,089,817.08
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1	Investasi Non Permanen		
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	3,109,630,021.00	3,109,630,021.00
2	Investasi Permanen		
	Investasi Permanen (GMTDC)	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
	Penyertaan Modal Pemerintah daerah (Perusahaan Daerah)	5,159,823,940.59	1,387,577,640.00
	Investasi Permanen lainnya (Bank BPD)	3,080,000,000.23	3,080,000,000.23
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	14,649,453,961.82	10,877,207,661.23
3	AKTIVA TETAP		
1	Tanah	524,401,146,500.00	524,926,581,500.00
2	Peralatan dan Mesin	121,447,844,630.00	136,896,014,947.00
3	Gedung dan bangunan	338,731,938,502.30	382,722,784,213.30
4	Jalan,Irigasi dan jaringan	992,295,429,594.40	1,102,234,326,347.85
5	Aset Tetap Lainnya	7,303,513,600.40	7,701,768,225.40
6	Kontruksi Dalam Pekerjaan	30,349,886,700.00	58,064,999,850.00
7	Akumulasi Peny.Aset Tetap	0.00	0.00
	Jumlah Aktiva Tetap	2,014,529,759,527.10	2,212,546,475,083.55
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	43,198,405,444.41	23,802,835.61
	Jumlah Dana cadangan	43,198,405,444.41	23,802,835.61
5	AKTIVA LAIN-LAIN		
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	125.973.484.650,33	119.585.924.861,73
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	3.576.308,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	654.270.750,00	1.240.923.517,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	1.477.748.873,00	1.498.147.890,00
Kas Di Bendahara JKN	1.675.517.277,00	327.529.529,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	54.812.378.810,00	52.631.631.573,00
Piutang Pendapatan	6.720.603.198,38	6.779.603.198,38
Piutang Lainnya	(16.571.683.199,60)	(15.503.515.730,92)
Penyisihan Piutang	592.377.806,28	552.944.941,22
Beban Dibayar Dimuka	11.148.600.807,86	9.865.699.833,00
Persediaan		
JUMLAH ASET LANCAR	186.483.298.973,25	176.982.465.920,41
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	55.144.796.229,13	33.421.510.128,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	9.054.000.000,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	55.144.796.229,13	42.475.510.128,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	57.789.721.250,13	45.120.435.149,00
ASET TETAP		
Tanah	598.685.806.251,14	596.672.806.251,14
Peralatan dan Mesin	278.962.713.547,86	239.364.995.060,95
Gedung dan Bangunan	798.404.952.512,37	711.890.576.825,87
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.269.260.389.930,52	1.937.032.782.627,28
Aset Tetap Lainnya	58.129.581.150,00	47.091.665.084,56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.611.936.844,78	51.779.454.253,89
Akumulasi Penyusutan	(1.242.356.557.153,94)	(1.063.907.372.106,86)
JUMLAH ASET TETAP	2.783.698.823.082,73	2.519.924.907.996,83
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	13.418.794.040,93	13.159.510.764,93
JUMLAH DANA CADANGAN	13.418.794.040,93	13.159.510.764,93
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	52.612.734.781,12	47.084.125.203,50
Aset Lain-lain	104.915.992.544,45	95.937.510.789,45
Akumulasi Amortisasi	(28.265.451.460,90)	(22.169.589.526,76)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(98.072.669.182,62)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	31.190.606.682,06	120.852.046.466,19
JUMLAH ASET	3.072.581.244.029,09	2.876.039.366.297,36
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.175.614,00	82.490.654,00
Utang Bunga	392.079.625,00	397.079.625,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	478.437.611,67	400.994.646,00
Utang Beban	4.126.535.540,00	2.889.082.674,00

No. Urt	URAIAN	TAHUN 2009 (Rp)	TAHUN 2010 (Rp)
1	2	3	4
2	Aset Tak berwujud	2,896,950,545.00	7,529,998,795.00
3	Aset lainnya	7,927,999,556.08	3,358,118,711.00
	Jumlah Aktiva Lain-lain	10,824,950,101.08	10,888,117,506.00
	TOTAL AKTIVA	2,178,964,175,122.04	2,343,007,692,903.47
II.	KEWAJIBAN	9,641,332,755.10	15,464,293,931.00
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2,837,425,021.00	2,837,425,021.00
2	Hutang Bunga dan Denda	397,079,625.00	397,079,625.00
3	Hutang Pihak Ketiga	4,714,972,925.10	11,043,649,344.00
4	Hutang PFK (gaji)	34,974,360.00	222,722,341.00
5	Hutang Jangka Pendek Lainnya	1,656,880,824.00	963,417,600.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9,641,332,755.10	15,464,293,931.00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
2	Utang Luar Negeri	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
III.	EKUITAS DANA	2,169,322,842,366.94	2,327,543,398,972.47
1	EKUITAS DANA LANCAR		
1	Akumulasi SILPA	71,900,273,878.59	87,600,562,447.48
2	Cadangan Piutang	7,973,042,336.38	13,416,797,676.38
3	Cadangan Persediaan	3,556,287,656.00	7,302,312,493.00
4	Pendapatan yang ditangguhkan	10,675,121,392.66	129,694,859.22
5	Dana yang Hrs disediakan utk Pemb Utang	(7,984,451,931.10)	(15,241,571,590.00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	86,120,273,332.53	93,207,795,886.08
2	EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN		
1	Diinvestasikan Dlm Investasi Jk Pendek	0.00	0.00
2	Diinvestasikan Dlm Investasi Jk Panjang	14,649,453,961.82	10,877,207,661.23
2	Diinvestasikan Dlm Aktiva Tetap	2,014,529,759,527.10	2,212,546,475,083.55
3	Diinvestasikan Dlm Aktiva Lain-lain	10,824,950,101.08	10,888,117,506.00
4	Dana yg Hrs Disediakan utk Pemb.Utang Jk	0.00	0.00
	Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan.	2,040,004,163,590.00	2,234,311,800,250.78
3	EKUITAS DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	43,198,405,444.41	23,802,835.61
	Jumlah Dana cadangan	43,198,405,444.41	23,802,835.61
	TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA	2,178,964,175,122.04	2,343,007,692,903.47

Sungguminasa, Juli 2011
BUPATI GOWA

H. ICHSAN YASIN LIMPO, SH, MH

Biografi Penulis



Riska Ayu panggilan Ayu lahir di P.satando 26 mei 1995 dari pasangan suami istri Bapak H. Abu dan Ibu Hj. Jaisa. Peneliti adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di P.satando Kecamatan Liukang tupabiring utara Kabupaten pangkep Kota Makassar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 17 Pulau satando lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Pangkajene lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Bungoro lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.